



Perkembangan Persurat Kabaran Suara Merdeka di Semarang Tahun 1950-2005

Anjik Zulianto[✉], Hamdan Tri Atmaja, R. Suharso

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2016
Disetujui September 2016
Dipublikasikan Oktober 2016

Keywords:

*Suara Merdeka,
government, press.*

Abstrak

Sejarah berdirinya surat kabar Suara Merdeka di Semarang, tidak terlepas dari surat kabar terdahulu yang pernah terbit di Semarang. Suara Merdeka di Semarang pada awalnya didirikan oleh Hetami, yang dulunya merupakan wartawan dari beberapa surat kabar di Semarang. Hetami mendirikan Suara Merdeka pada 11 Februari 1950, yang bertepatan pada masa Orde Lama. Suara Merdeka di Semarang berasal sejak tahun 1950an. Perusahaan surat kabar Suara Merdeka awalnya merupakan perusahaan surat kabar harian yang hanya mampu mencetak beberapa eksemplar koran saja. Karena keuletan dan kecakapan di dunia jurnalistik pendiri perusahaan surat kabar Suara Merdeka, perusahaan ini semakin hari semakin mengalami peningkatan dari segi produksi dan perekonomiannya. Akan tetapi perjalanan perusahaan surat kabar tidak selalu mulus tetapi ada hambatan serta rintangan yang menjadi ujian didalam kemajuan perusahaan Suara Merdeka. Hambatan tersebut adalah di antaranya dengan adanya berbagai aturan tentang pers yang dikeluarkan oleh pemerintah, selain itu juga rintangan yang dihadapi Suara Merdeka adalah dengan adanya krisis yang melanda Indonesia. Dengan keuletan dan kemampuan di bidang jurnalistik dan terobosan-terobosan pemegang kekuasaan di Suara Merdeka, maka rintangan tersebut mampu dihadapi dan Suara Merdeka dapat bertahan dan berkembang dengan berbagai rintangan tersebut dan menjadi salah satu surat kabar terbesar di Jawa Tengah, dan mampu eksis sampai saat ini.

Abstract

The history of the Suara Merdeka newspaper in Semarang is inseparable from the previous newspapers that once ever published in Semarang. Suara Merdeka in Semarang was originally founded by Hetami, who once was the reporter from several newspapers in Semarang. Hetami founded Suara Merdeka on February 11, 1950, which coincided with the Old Order. the development of Suara Merdeka Newspaper Company in Semarang which founded in 1950s. Suara Merdeka Newspaper Company was originally a daily newspaper company which was only able to print just a few exemplars of newspapers. Because of the tenacity and prowess in journalism world of the founder of Suara Merdeka Newspaper Company, the production and economy condition have increasingly improved. However, the company's journey to succeed was not always easy; there are problems and obstacles that must be faced by the Suara Merdeka Company. Some of them are the various rules on press regulations issued by the government and a crisis in Indonesia. With the tenacity and ability in journalism and the breakthroughs of the authority in Suara Merdeka, the problems can be faced and Suara Merdeka can survive and evolve from the problems and became one of the biggest newspapers in Central Java, and is able to exist until today.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C5 Lantai 1 FI Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: sejarah@mail.unnes.ac.id

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Media adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber komunikator kepada khalayak umum dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan internet. Salah satu peran media massa yaitu media adalah refleksi fakta, terlepas dari rasa suka atau tidak suka, ibarat "cermin" peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat ataupun dunia (Suryawati, 2011:37). Komunikasi sebagai ilmu, berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan alat-alat komunikasi dan beriringan dengan munculnya kesadaran akan pentingnya arti informasi dan komunikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyadarkan manusia bahwa informasi yang diemban oleh komunikasi semakin penting. Dengan menguasai informasi, orang akan menang dalam persaingan kehidupan (Ermanto, 2005:32).

Sejarah pers di Semarang berawal dari pertumbuhan industri pers milik orang Eropa yang di rintis oleh perusahaan *Olifent & Co* pada tahun 1846, di daerah Semarang. Perusahaan ini memperoleh izin dari Gubernur Jendral J.J Rouchussen untuk menerbitkan *Semarangsche Adventieblad* dan *Semarang Courant*. Tahun 1852, P.J. De Groot menerbitkan *Semarang Nieuwsen Advertentieblad*, yang pada 1866 berganti nama *De Locomotief*. Pergantian nama surat kabar tersebut dikaitkan dengan berdirinya *Nederlandsch-Indisch Spoorweg Maatschappij* pada tahun 1862. G.C.T. Van Dorp menerbitkan *Selompert Melajoe* pada tahun 1960 dan *Tjahaja India* pada tahun 1882. Jasz Bros menerbitkan *Tamboor Melajoe* pada tahun 1888. Keberadaan industri pers milik orang Eropa itu disusul dengan kemunculan perusahaan pers milik orang Cina. Sebagai contoh, pada tahun 1899 di Semarang berdiri *Hoang Thaïj & Co*, yang menerbitkan harian *Sinar Djawa* (Dewi Yuliati, 2008:4-5).

Kebijaksanaan pemerintah terhadap pers di zaman Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan. Hal itu disebabkan beberapa kali pula terjadi perubahan dalam corak

pemerintahan (Abdurrachman Surjomihardjo, 2002:176). Seperti kita ketahui, pengertian pers di Indonesia sekarang lebih berkaitan dengan sebuah lembaga sosial yang mencakup modal, perangkat, produksi perusahaan, periklanan hubungan masyarakat, SIUUP, dan sebagainya. Pers tidak lagi menjadi lembaga komunikasi semata. Ia telah menjadi lembaga ekonomi, bahkan unit produksi. Karena itu, yang menentukan dalam pers disitu tidak semata-mata berasal dari jurnalistik, tapi juga dari manajer atau pemilik modal, keadaan ini sangat berbeda dengan keadaan pers tahun 1950-an. Ketika itu pers lebih berarti "jurnalisme". Artinya, pers bertolak dari wartawan yang mengumpulkan informasi dengan kiat kreatif, memberikan interpretasi dan konteks imajinatif dan kemudian menyiaran dengan pribadi (Ana Nadhya Abrar, 1992:45).

METODE

Dalam pengumpulan sumber sejarah penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu dan pada prinsipnya penelitian adalah suatu proses berbentuk siklus bersusun dan berkesinambungan. Menurut Kuntowijoyo (1994:xii), metode sejarah adalah bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah. Jadi metode ada hubungannya dengan satu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyidiakan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan) yang akan di teliti (Helius Sjamsuddin, 2007:13).

Pengumpulan data sumber primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber seperti wartawan senior suara merdeka, dan karyawan suara merdeka. Sumber sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti buku yang berkaitan dengan pers. Tahapan kedua adalah melakukan kritik sumber terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang masalah otentisitas yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang masalah kredibilitas melalui kritik intern. Setelah

melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku sejarah, buku, maupun hasil penelitian di lapangan. Tahap ini sangat penting agar penulis terhindar dari subjektivitas. Historiografi merupakan langkah terakhir setelah ketiga prosedur yang lain telah dipenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Surat Kabar di Semarang

Kota Semarang, yang pada masa kolonial Belanda menjadi kota karisidenan Semarang dan mulai 1 Januari 1930 menjadi ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kota tersebut merupakan ladang subur bagi pertumbuhan-pertumbuhan dan perkembangan industri pers (Dewi Yuliati, 2009:3). Selain itu juga, pada masa kolonial kota Semarang merupakan kota yang sangat strategis dan merupakan kota pilihan bagi bangsa Belanda pada masa itu, karena kondisinya yang sangat strategis. Pada masa kolonial kota Semarang sebagai wilayah administratif *gemeente* (Kota Besar/Kota Praja) dibentuk dengan dasar *besluit* gubernur Jendral Hindia Belanda tertanggal 1 April 1906 (Dewi Yuliati, 2009:55). Dengan kondisi Semarang yang strategis, selain sebagai kota karesidenan, juga merupakan kota yang besar di daerah Jawa Tengah. Oleh karena itu Semarang menjadi ladang subur dalam bisnis surat kabar pada masa itu. Perkembangan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia banyak mengembangkan sebuah industri surat kabar di Semarang.

Di Semarang pertumbuhan industri pers milik orang Eropa dirintis oleh perusahaan *Olifant & Co.* Pada 184, perusahaan ini memperoleh izin dari Gubernur Jendral J.J. Rochussen untuk menerbitkan Semarang *Advertentieblad Advertentieblad* dan *Semarangsche Courant*. Pada tahun 1852, P.J. De Groot menerbitkan *Semarangsche Nieuwsen Advertentieblad*, yang pada tahun 1862 berganti nama *De Locomotief* (Dewi Yuliati, 2008:4). Hampir bersamaan dengan perniagaan, di Semarang diterbitkan sebuah surat kabar peranakan Tionghoa yang bernama *Warna*

Warta. Surat kabar tersebut mula-mula diselenggarakan oleh *NV Hap Sing Koengsie* dan merupakan organ resmi dari *Hoa Kiauw Toan The Hwe* (perkumpulan perantau Tionghoa), Semarang. Pemimpin redaksi *Warna Warta* bernama Th. H. Phao, dan redaktur di Jakarta ialah P.L. Gouw. *Warna Warta* kemudian berganti tangan dan namanya diganti menjadi *Djiet Po*. Tahun 1909, di Semarang terbit pula sebuah surat kabar peranakan Tionghoa yang bernama *Djawa Tengah*, dicetak di *NV Java ien Boe Kongsie*, dan setelah tahun 1930 NV tersebut digantikan menjadi suatu NV baru, yaitu *Handel Maatschappijen Drukkerij Djawa Tengah*. Djawa Tengah berpendirian sedikit konservatif dan mencoba ambil jalan tengah dalam perselisihan antara Chung Hua Hui dan pers peranakan Tionghoa. Bulanan *Djawa Tengah*, yaitu *Djawa Tengah Review*, sering memperbincangkan persoalan Tionghoa di Indonesia yang menimbulkan polemik (Abdulrachman Surjomiharjo, 2002:53-54).

Serkat Islam Semarang memiliki harian *Sinar Djawa* (1914-1918) yang kemudian bernama *Sinar Hindia* (1981-1924). Harian Serkat Islam Semarang ini diwarnai oleh kritik-kritik tajam para jurnalis dan redakturnya seperti Semaoen, Darsono, dan Marco Kartodikromo. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mewaspadai *Sinar Hindia* sebagai surat kabar ekstrimis (Dewi Yuliati, 2008:10). Pada masa pemerintahan penjajahan militer Jepang di Semarang, terdapat beberapa surat kabar yang terbit, diantaranya yang berada di Semarang terdapat harian *Sinar Baroe* dengan redaksinya Abdul Gafar Ismail Gelar Sultan Indra Maharaja yang kemudian digantikan oleh Parada Harahap. *Sinar Baroe* merupakan penggabungan dari surat kabar *Matahari*, *Soeara Semarang*, dan *Daja Oepaja* (Dewi Yuliati, 2008:15).

Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RI. Bersamaan itu, kekuasaan di segala sendi kehidupan yang selama ini mereka pegang diserahkan atau diambil alih oleh bangsa Indonesia. Demikian halnya yang terjadi di dunia pers. Surat kabar-surat kabar milik pemerintah kolonial berhenti terbit, asset-asetnya dikuasai oleh pihak republik. Harian

Soeloeh Rakjat yang diterbitkan RVD diambil alih oleh Hetami (Amir Machmud NS, 2010:4). Harian *Soeloeh Rakjat* setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, diambil oleh Hetami. Kemudian nama harian diganti dengan Suara Merdeka (Dewi Yuliati, 2008:15).

Sejarah Awal Mula Berdirinya Suara Merdeka di Semarang pada Masa Orde Lama

Pada awal mulanya surat kabar ini merupakan surat kabar turunan dari surat kabar *Soeloeh Rakjat*, dimana pada masa revolusi Hetami selaku penggas surat kabar Suara Medeka merupakan wartawan yang sangat berpengaruh penting di surat kabar *Soeloeh Rakjat*. Di bawah kepemimpinan Hetami *Soeloeh Rakjat*, setelah Indonesia mencapai masa kemerdekaannya pada masa revolusi tepatnya pada 1945-1949, maka Hetami mengambil alih *Soeloeh Rakjat* dan dari surat kabar *Soeloeh Rakjat* Hetami mulai merintis surat kabar di Semarang yang diberi nama Suara Merdeka. Tepatnya pada tanggal 11 Februari 1950, pada waktu itu pendirian surat kabar Suara Merdeka mulai dirintis oleh Hetami, dengan menggunakan alat cetak milik *N.V. Handelsdrukkerij de Locomotif*, Hetami mulai merintis penerbitan surat kabar yang diberi nama Suara Merdeka (wawancara, Sutrisna, 3 Juni 2016).

Kendala yang dihadapi oleh Suara Merdeka pada masa awal berdirinya di Orde Lama adalah masalah ketersediaan kertas yang masih langka di kalangan perusahaan surat kabar Indonesia. Termasuk yang dialami oleh perusahaan surat kabar Suara Merdeka. Hal ini dikarenakan pada masa itu kondisi kertas di dalam negeri masih sangat mahal, dan kertas itu sendiri harus didatangkan melalui impor dari luar negeri, dengan biaya yang tidak sedikit tentunya. Kondisi tersebut menjadikan beberapa surat kabar yang tidak mampu untuk menyuplai kertas dalam proses produksi korannya akhirnya, harus gulung tikar. Atas masalah yang dihadapi oleh penerbitan surat kabar masa itu, pemerintah melalui kementerian penerangan mengeluarkan keputusan untuk melakukan impor kertas dari luar negeri. Hal ini bertujuan untuk membantu perusahaan surat kabar dalam melakukan

produksi koran yang diterbitkan, dan pemerintah disini menjual kertas yang di impor tersebut dengan harga yang murah kepada perusahaan surat kabar yang ada termasuk Suara Merdeka. Sehingga kendala kekurangan kertas untuk kegiatan produksi koran Suara Merdeka pada masa itu sedikit bisa teratasi. Situasi yang dialami surat kabar Suara Merdeka pada masa itu sangatlah wajar, dikarenakan pada masa Orde Lama merupakan masa awal kemerdekaan. Pada masa itu, kondisi perekonomian Indonesia masih kurang tertata dengan baik, karena masih lemahnya sistem tatanan pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Lama (wawancara, Sutrisna, 3 Juni 2016).

Suara Merdeka di Semarang pada masa Orde Lama berada di bawah N.V. Penerbitan, Pertjetakan dan Dagang Semarang, di Semarang, dengan adanya penyitaan tersebut memberikan dampak yang sangat membebani terhadap perusahaan surat kabar Suara Merdeka di Semarang. Dengan diterbitkannya peraturan surat keputusan perang tertinggi No 8 tahun 1960 tersebut maka, kondisi surat kabar Suara Merdeka pada masa itu semakin tertekan. Situasi ini dikarenakan peraturan tersebut menegaskan tentang penyitaan alat percetakan yang dimiliki oleh enam penerbitan dan percetakan surat kabar yang ada di Indonesia dan percetakan tersebut adalah: (1) Badan penerbit dan percetakan "Jakarta Pers N.V." Di Jakarta; (2) N.V. Penerbitan, percetakan dan dagang Semarang, di Semarang; (3) N.V. Percetakan dan penerbitan "Abadi", di Jakarta; (4) N.V. Percetakan dan penerbitan Sulawesi di Makasar; (5) N.V. Perseroan dagang dan percetakan pers nasional, di Surabaya; (6) N.V. Perusahaan penerbitan dan percetakan "Bandung", di Bandung.

Penyitaan terhadap mesin percetakan yang ada di NV. Percetakan dagang Semarang, yang digunakan oleh Suara Merdeka membuat Suara Merdeka tidak bisa mencetak koran terbitannya. Atas kondisi tersebut maka Suara Merdeka untuk sementara mengalihkan percetakan ke Yogyakarta. Langkah tersebut dilakukan Hetami sebagai pemilik percetakan surat kabar Suara Merdeka untuk tetap melakukan percetakan surat kabar Suara

Merdeka. Perpindahan percetakan ke Yogyakarta tersebut juga dibarengi dengan awak dari surat kabar Suara Merdeka, di mana pada saat itu awak Suara Merdeka ditempatkan di losmen Kentjana. Kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Awak suara merdeka kembali lagi ke Semarang setelah pemerintah mencabut keputusannya tentang penyitaan percetakan NV. Percetakan dagang Semarang dan mengembalikannya kepada perusahaan percetakan surat kabar Suara Merdeka (wawancara, Sutrisna, 3 Juni 2016).

Pada masa demokrasi terpimpin suasana kehidupan pers PKI berbanding terbalik dengan kehidupan pers nasional di Indonesia pada umumnya. Suasana kehidupan pers pada masa Orde Lama menyebabkan bergairanya surat kabar-surat kabar PKI seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti. Selain itu PKI juga menerbitkan berkala Bintang Muda, Mingguan Sport, Harian Rakjat Minggu, dan Zaman Baru. Organisasi Profesi wartawan persatuan wartawan Indonesia berhasil di tuggangi oleh PKI, termasuk juga Serikat Penerbitan Surat Kabar (SPS) dan kantor berita Indonesia (Ermanto, 2005:18).

Situasi yang ada pada masa itu yang sangat mencemaskan, wartawan-wartawan senior anti PKI mendirikan badan pendukung Soekarnoisme (BPS) tanggal 1 September 1964 di Jakarta. Pengurus BPS adalah Adam Malik sebagai ketua, B.M. Diah sebagai wakil ketua, Sumatoro sebagai ketua harian, Junus Lubis sebagai wakil ketua harian, Drs. Aswani Said sebagai sekertaris umum Sunaryo Prawirodinata sebagai bendahara, Sugiharso sebagai Biro dalam negeri, Zaini Dffendi Al Sebagai biro luar negeri dan Adyatma sebagai penghubung. Berdirinya BPS di Indonesia didukung dengan beberapa surat kabar yang ada di Indonesia diantaranya adalah: Pikiran Rakjat (Bandung), Suara Merdeka (Semarang), Tempo (Semarang), Kedudukan Rakjat (Yogyakarta), dan Suara Rakjat (Surabaya). Surat kabar Medan yang mendukung BPS adalah Waspada, Mimbar Ummum, Indonesia Baru, Sinar Masyarakat, Mimbar Taruna, Mingguan Film, Suluh Masa, Resopim, Duta Minggu, Genta Revolusi, Siaran

Minggu, dan Waspada Teruna (Ermanto, 2005:18-19).

Pada masa Orde Lama sejak pemerintah menerbitkan peraturan pencabutan izin terbit yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Februari 1965, terhadap surat kabar yang pro terhadap BPS, surat kabar Suara Merdeka sempat berganti nama menjadi Berita Yudha. Pergantian nama Surara Merdeka ke Berita Yudha tersebut Hetami sebagai pemilik perusahaan surat kabar Suara Merdeka lebih memilih berafiliasi kepada tentara. Hetami meyakini bahwa kesetiyaan ABRI terhadap pancasila tidak akan tergoyahkan, dan atas dasar tersebut maka Hetami lebih memilih berafiliasi kepada surat kabar yang diterbitkan oleh tentara. Pergantian nama Suara Merdeka tersebut menjadi Berita Yudha hanya beberapa saat saja yang dimulai pada penerbitan awal surat kabar Berita Yudha pada tanggal 14 Februari 1966 sampai 11 juni 1966. Setelah itu surat kabar Suara Merdeka yang sempat berganti nama menjadi Berita Yudha tersebut berganti menjadi surat kabar Suara Merdeka yang berlangsung sampai masa selanjutnya (wawancara, Sutrisna, 3 Juni 2016).

Survivalitas Suara Merdeka dengan Adanya Peraturan Pers yang Diterbitkan Pemerintah Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru kehidupan pers awal mulanya dirasa sangat memberi angin segar kepada perusahaan perusahaan penerbit surat kabar yang selama masa Orde Lama banyak mendapatkan tekanan dari penguasa masa Orde Lama masa itu. Pengaturan terhadap pers pada masa itu dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara yang berkesan manis dan idealistik. Seperti yang disebutkan dalam undang-undang No. 11 Tahun 1966, tentang ketentuan pokok pers. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa di dalam Bab II tentang fungsi dan kewajiban pers, dalam pasal 4, dimana di dalam pasal 4 disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu kondisi tersebut mengalami perubahan, dimana pada masa pemerintahan

Orde Baru pemerintah mengeluarkan beberapa pengaturan terhadap pers yang terbit di Indonesia pada masa itu dengan berbagai peraturan yang semakin mempersulit kehidupan pers dibandingkan dengan kondisi pers pada masa Orde Lama.

Pengaturan tersebut misalnya seperti dikeluarkannya jargon pers pancasila, konsep pers/jurnalisme pembangunan, kemitraan pers pemerintah masyarakat, dan lain-lain. Regulasi dibidang penerbitan pers berupa surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), wadah tunggal organisasi wartawan, kewajiban radio radio dan televsi swasta untuk merelai berita-berita dari RRI dan TVRI, serta larangan untuk memproduksi berita sendiri merupakan bentuk bentuk kontrol dan represi yang sungguh-sungguh dahsyat (Dewi Yuliaty, 2008:39). Pada masa Orde Baru pemerintah juga mengatur tentang keberadaan SIT di setiap perusahaan yang menerbitkan pers. Ketentuan mengenai SIT dalam UU pokok pers diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Penerangan No.03/ Per/Menpen/ 1969, tanggal 27 Mei 1969.

Di masa pemerintahannya, penguasa Orde Baru sangat mengawal kehidupan di dunia media dengan pemerintah menekankan pada kebebasan pers yang bertanggung jawab. Adanya peraturan yang termuat di Undang-undang mengenai peraturan tentang pers, pihak Suara Merdeka menyikapinya dengan bijak, sesuai moto Suara Merdeka pada masa itu yaitu Independen Objektif Tanpa Prasangka, moto perusahaan surat kabar Suara Merdeka tersebut, secara umum menggambarkan bentuk haluan non politik Suara Merdeka pada masa Orde Baru. Maksud dari independen adalah artinya mempunyai sikap bebas, mengikuti sikap yang diyakini sebagai sesuatu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Objektif, tidak menonjolkan opini, melainkan fakta. Tanpa prasangka adalah memandang sesuatu secara proporsional. Disini Suara Merdeka lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum, sebagai surat kabar yang memberikan informasi terhadap masyarakat secara umum, dan memberikan wawasan serta pengetahuan.

Pada perkembangannya peraturan dalam mengawal pers di Indonesia juga terdapat Undang-undang No. 21/1982. Di dalam Undang-undang tersebut yang sangat ditonjolkan adalah mengenai ketentuan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang harus dimiliki oleh perusahaan pers, Pada masa Orde Baru. Dengan dikeluarkannya surat izin terbit dan surat izin usaha penerbitan pers, maka surat kabar Suara Merdeka dalam melakukan penerbitan harus mengantongi kedua surat izin tersebut, disamping itu pada masa Orde Baru ketika akan melakukan pergantian pemimpin redaksi di Suara Merdeka, juga harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada waktu pengurusannya untuk mendapatkan SIUPP juga paling cepat membutuhkan waktu satu tahun (wawancara, Sutrisna, 3 Juni 2016).

Dampak peraturan pers selanjutnya yang menjadi beban di Suara Merdeka pada masa Orde Baru adalah terdapat peraturan baru yang dikeluarkan oleh kementerian penerangan No. 01/Per/Menpen/1982. Dimana di dalam peraturan tersebut terdapat dimungkinkannya terjadinya pencabutan terhadap Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), apabila penerbit tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di masa Orde Baru. Dengan keluarnya peraturan tersebut suasana penerbitan surat kabar Suara Merdeka di Semarang memiliki tekanan tersendiri yang membebani oleh penerbitan koran hasil cetakannya. Keadaan tersebut sangat dianggap membebani oleh penerbitan surat kabar yang dilakukan oleh perusahaan surat kabar Suara Merdeka. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru sangat detail sekali dalam melakukan kontrol terhadap surat kabar yang ada pada masa itu. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sangat dirasakan oleh para wartawan surat kabar Suara Merdeka pada masa itu.

Pada masa Orde Baru surat kabar Suara Merdeka lebih cenderung ke masyarakat umum dan tidak memihak pada kelompok atau partai tertentu. Suara Merdeka di Semarang pada masa itu lebih menonjolkan pers yang bercondong kepada pemerintah, sesuai dengan tatanan yang

termuat di dalam Undang-undang yang berjalan sesuai pers pancasila.

Pada penulisan berita yang diterbitkan pada masa Orde Baru, Suara Merdeka tidak pernah memihak pada suatu kelompok tertentu bahkan dimasa Orde Baru, ketika memasuki masa pemilihan umum, dimana pada masa itu banyak terjadi pemberitaan tentang partai-partai tertentu dan di dalam surat kabar lain menonjolkan salah satu partai, Suara Merdeka tidak melakukan hal tersebut. Suara Merdeka juga masih tetap memberitakan berita perpolitikan pada masa Orde Baru sebagai berita untuk mengetahui informasi suasana perpolitikan bagi masayarakat, akan tetapi isi berita seimbang dan tidak memihak, kepada partai tertentu, atau kelompok tertentu. Suara Merdeka dalam penyajianan beritanya seimbang sesuai dengan kondisi apa yang ada pada masa itu. Isi pemeberitaan yang dikeluarkan oleh surat kabar Suara Merdeka juga isinya tidak memuat berita-berita yang mengancam keberlangsungan keamanan seperti berita-berita konflik yang dapat memicu sebuah perselisihan yang dapat memecah keberlangsungan ketentraman negara. Keutamaan berita yang di keluarkan dalam pemberitaan di penerbitan surat kabar Suara Merdeka adalah mengenai berita nasional. Penerbitan surat kabar Suara Merdeka lebih menekankan pada pemberitaan seperti berita-berita daerah yang bersifat umum, untuk memberikan informasi dan pendidikan bagi para pembaca penikmat Suara Merdeka.

Kebijakan yang di ambil untuk menjaga kelangsungan dalam penerbitan surat kabar Suara Merdeka pada masa Orde Baru dengan adanya peraturan pers yang sangat ketat tersebut Hetami sebagai pemimpin di Suara Merdeka membuat terobosan dengan memperbaiki menejemen di bidang produksinya. Terobosan-terobosan dan perbaikan dibidang penerbitan Suara Merdeka masih bisa tetap berproduksi, dengan adanya peraturan-peraturan pers yang memberatkan tersebut. Bahkan terobosan-terobosan dalam perbaikan di bidang produksi dan perbaikan bidang ekonomi mengalami berbagai macam perkembangan.

Kondisi produksi koran hasil cetakan perusahaan surat kabar Suara Merdeka pada masa Orde Baru meskipun banyak pengekangan-pengekangan yang menjadi beban di dalam penerbitan Suara Merdeka, akan tetapi Suara Merdeka masih bisa berproduksi dan mengalami peningkatan. Suasana tersebut dengan adanya terobosan oleh Hetami dengan membenahi pada sektor percetakan dalam bidang pemproduksi di bagian redaksi. Masa kepemimpinan Budi Santoso di masa Orde Baru dengan adanya peraturan yang ketat terhadap penerbitan pers, Budi Santoso di sini dapat menyikapi peraturan tersebut dengan berbagai terobosan-terobosan dengan membenahi di sektor perekonomiannya. Pembenahan yang dilakukan di dalam persurat kabaran Suara Merdeka dengan mengadakan pendidikan manajemen yang pendidiknya langsung didatangkan langsung dari Surabaya. Di sini redaksi-redaksi kunci setiap harinya selama tiga bulan di didik untuk mengikuti pendidikan manajemen. Dalam aktifitasnya para jurnalis tersebut setiap paginya bekerja seperti bisa dan setelah jam 13.00 WIB, semua jurnalis khususnya redaksi kunci perusahaan Suara Merdeka diwajibkan mengikuti pendidikan manajemen perekonomian pada masa itu. Setelah mendapatkan pendidikan manajemen perekonomian tersebut setelah jam 17.00 WIB, melakukan aktifitas lagi seperti biasanya. Melalui pendidikan yang telah diberikan tersebut, memberikan hasil yang memuaskan dimana perusahaan Suara Merdeka mengalami hasil peningkatan kesejahteraan, peningkatan oplah, peningkatan gaji, mengalami peningkatan yang cukup baik sekali (Humain As, wawancara 6 Juli 2016).

Eksistensi Suara Merdeka pada Masa Reformasi sampai Tahun 2005

Pada masa reformasi perusahaan surat kabar Suara Merdeka mengalami penurunan penjualan, dikarenakan terjadinya krisis moneter pada masa reformasi, Suara Merdeka yang dipimpin oleh Budi Santoso membuat beberapa terobosan. Pada masa krisis moneter yang melanda Indonesia eksistensi surat kabar Suara Medeka sempat mengalami penurunan oleh

masyarakat. Hal ini dikarenakan melemahnya perekonomian di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu banyaknya saingen surat kabar yang terbit pada masa reformasi karena dipermudahkannya mengenai kebebasan pers pada era reformasi, juga memberikan dampak bagi perekonomian di Suara Merdeka. Salah satu strategi yang digunakan oleh Budi Santoso pada masaitu adalah pengurangan halaman koran, dan pengurangan daerah penerbitan yaitu Solo (wawancara Sugeng, 19 Juli 2016).

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia, maka perusahaan surat kabar Suara Merdeka mulai berbenah, dengan bangkit dan terus menambah jumlah halaman dan memperbaiki penampilan. Pada tahun 2000 dengan adanya otonomi daerah dengan menitik beratkan pengolahan daerah masing-masing setiap kabupaten/ kota, maka perusahaan surat kabar Suara Merdeka membuat gagasan gasan baru di dunia surat kabar kususnya di daerah Jawa Tengah dengan merangkul koran-koran lokal yang berbentuk komunitas. Selain tampil dengan kondisi yang lebih segar, perusahaan surat kabar Suara merdeka pada saat itu juga sempat melakukan keputusan untuk mengganti moto perusahaan, dan semenjak tahun 2004, perusahaan surat kabar Suara Merdeka mengganti moto Suara Merdeka dari "Independen, Objektif Tanpa Prasangka" menjadi "Perekat Komunitas Jawa Tengah". Pergantian moto tersebut semata mata juga untuk menambah eksistensi surat kabar Suara Merdeka di Jawa Tengah (Wawancara Sri Humaini As, 30 Juni 2016).

Semenjak pergantian moto Suara Merdeka, yang dilakukan oleh Budi Santoso, pada masa itu perusahaan surat kabar Suara Merdeka memulai babak baru di dunia persurat kabaran di Jawa Tengah. Dimana pada masa ini untuk mendekatkan komunitas pembaca Suara Merdeka di daerah-daerah, maka Suara Merdeka menerbitkan lembar surat kabar-surat kabar komunitas ala Suara Merdeka. Penerbitan surat kabar ini dilakukan Suara Merdeka dalam bentuk edisi suara-suara, mulai

Semarang Metro untuk daerah Semarang, Suara Muria untuk wilayah eks karesidenan Pati, Suara Pantura untuk eks karesidenan Pekalongan, Suara Surakarta untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, Suara Banyumas untuk wilayah eks karesidenan Banyumas, dan Suara Kedu untuk wilayah masyarakat di daerah karesidenan Kedu dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terbukti dengan terobosan yang dilakukan oleh Budi Santoso, pada masa itu membawa hasil yang sangat memuaskan di perusahaan surat kabar Suara Merdeka. Dimana perusahaan surat kabar Suara Merdeka semakin populer di kalangan-kalangan pembaca, dan menempati posisi tersendiri dikalangan masyarakat daerah Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil yang didapatkan melalui terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Budi Santoso tersebut akhirnya perusahaan surat kabar Suara Merdeka mendapatkan penghargaan koran terbaik, pada 11 Februari 2007, *Versi Cakram Award*.

SIMPULAN

Perusahaan surat kabar Suara Merdeka yang didirikan oleh Hetami tepatnya pada tanggal 11 Februari 1950, di Semarang merupakan salah satu surat kabar harian yang populer dikalangan masyarakat, kususnya di daerah Jawa Tengah. Suara Merdeka dalam perjalanan sejarahnya, pada masa awal berdirinya tanggal 11 Februari 1950, mengalami perkembangan pesat yang terjadi selama ini dapat dilihat dari kondisi perusahaan surat kabar Suara Merdeka, dilihat dari segi perekonomian selama kurun waktu pertama berdirinya sampai sekarang. Perkembangan perusahaan surat kabar Suara Merdeka, tidak lepas dari keuletan pendiri perusahaan surat kabar Suara Merdeka yaitu Hetami, yang merupakan sosok jurnalis yang berpengalaman dan mumpuni. Selain itu juga, perkembangan perusahaan surat kabar Suara Merdeka selama ini tidak terlepas juga dari penerus pemegang kekuasaan setelah Hetami, yaitu Budi Santoso.

Perjalanan perusahaan surat kabar Suara Merdeka di Semarang tidak selamanya berjalan

mulus, seperti apa yang ada pada masa sekarang. Dapat dilihat dampak yang dihadapi, dari peraturan peraturan pers yang ada yang dikeluarkan pemerintah pada masa era Orde Lama sampai masa reformasi, dirasa sangat memberi dampak yang berat bagi surat kabar Suara Merdeka. Dampak yang dihadapi tersebut, seperti pada masa Orde Lama surat kabar Suara Merdeka sempat berganti nama menjadi Berita Yudha, yang diakibatkan karena tekanan peraturan pemerintah pada masa itu. Selain itu juga perusahaan surat kabar Suara Merdeka, sempat mengalami masalah pada saat era reformasi. Situasi ini diakibatkan karena krisis yang terjadi pada masa itu, kondisi ini mengakibatkan gangguan perekonomian di perusahaan surat kabar Suara Merdeka. Akan tetapi situasi tersebut dapat diatasi dengan, keuletan dari Budi Santoso, dengan membuat terobosan-terobosan untuk mengatasi situasi pada masa itu. Dengan keuletan serta kematangannya mengelola dan membuat terobosan-terobosan di perusahaan surat kabar Suara Merdeka akhirnya Suara Merdeka dapat bangkit menjadi koran terbaik di Indonesia pada tahun 2007 *Versi Cakram Awards*.

Eksistensi surat kabar Suara Merdeka juga sampai sekarang masih tetap terjaga dengan baik. Kondisi ini dapat dilihat dari segi kemajuan teknologi pada masa sekarang, dimana banyak menggunakan teknologi elektronik, seperti TV dan internet. Akan tetapi, dengan keuletan penegolahan perusahaan surat kabar Suara Merdeka, dapat mengatasinya. Salah satunya adalah membuat jaringan berita *onlain* yang dapat dinikmati pembacanya melalui jaringan internet dengan situs, *Cy bernews.com*

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer :

- Wawancara dengan Bapak Sutrisna, hari Jumat 3 Juni 2016
Wawancara dengan Ibu Sri Humaini Adisusilo, hari Jumat 30 Juni 2016
Wawancara dengan Bapak Sugeng Irianto, hari Selasa 19 Juli 2016

Sumber Sekunder :

- Abrar, Ana Nadya. 1992. *Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa*. Yogyakarta: Liberty.

- Ermanto, 2005. *Wawasan Jurnalistik Praktis*. Yogyakarta: Cinta Pena.
Machmud NS, Amir. 2010. *Arus Generasi Pengemas Informasi*. Semarang: Masscom Graphy.
Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyka.
Sjamsudin, Helius. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
Surjomihardjo, Abdurrachman, dkk. 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
Suryawati, Indah. 2011. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Bogor: Ghali Indonesia.
Yuliati, Dewi, Dkk. 2008. *Melacak Jejak Pers Jawa Tengah*. Semarang: PT. Masscom Graphy
Yuliati, Dewi. 2009. *Menuju Kota Industri Semarang Pada Era Kolonial*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Perss.